

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
LEGISLATIF TAHUN 2019
(STUDI KASUS PERWIRAN NURUL HUDA DESA TELUK
PANJI I KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN)**

SKRIPSI

OLEH:

DEWI PURNAMASARI

16.851.0021



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI KASUS PERWIRITAN
NURUL HUDA DESA TELUK PANJI I KECAMATAN
KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

DEWI PURNAMASARI

16.851.0021



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun
2019 (Studi Kasus Perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kecamatan
Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Dewi Purnamasari
NPM : 16.851.0021
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

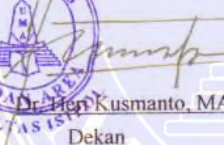
Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing



Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I



Armansyah Matondang, S.sos, M.Si
Pembimbing II



Dr. Hen Kusmanto, MA
Dekan



Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP
Ka.Prodi

Tanggal Lulus:

PENGAJUAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area

Nama : Dewi Purnamasari

NPM : 168910021

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul :

1. Partisipasi dan perilaku politik perempuan dalam pemilihan umum tahun 2019 (Studi kasus kelompok Perwitan Nural - Huda, Teluk Pangh I, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Peran Binas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PLH) untuk menggalakan program pengurangan KALPATARU di kota Medan.

Dengan dosen pembimbing :

1. Beby Maghito Batu bara, S. Sos, M. Ap
2. Armansyah Matondang, S. Sos, M. Si

Demikian surat permohonan pengajuan judul dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh ketua Program Studi Ilmu.....

Medan, 16 Desember 2019

Hormat Saya,

Dewi Purnamasari
(Dewi Purnamasari)

Judul Penelitian yang disetujui No : (.../...)

Partisipasi (dan perilaku) politik perempuan dalam pemilihan Legislatif tahun 2019 (Studi kasus kelompok perwitan Nural - Huda, Teluk Pangh I, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Dengan dosen pembimbing .

1. Ketua/ Pembimbing I : Beby Maghito Batu Bara, S. Sos, M. Ap
2. Anggota/ Pembimbing II : Armansyah Matondang, S. Sos, M. Si
3. Sekretaris : Khairunnisa Lubis, S. Sos, M. Pol

Catatan :

.....
.....
.....

Medan, 16 Desember 2019

Disetujui oleh

Ketua Program Studi: Ilmu pemerintahan

Evi Yunita Kurniati
(Evi Yunita Kurniati, S. Sos, M. Ap)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 7 Juni 2021



Dewi Purnamasari

16.851.0021



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Purnamasari
NPM : 16.851.0021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL)
Jenis Karya : Skripsi/Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Non-eksklusif (Non-exclusive-Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul : Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Perwiraan Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

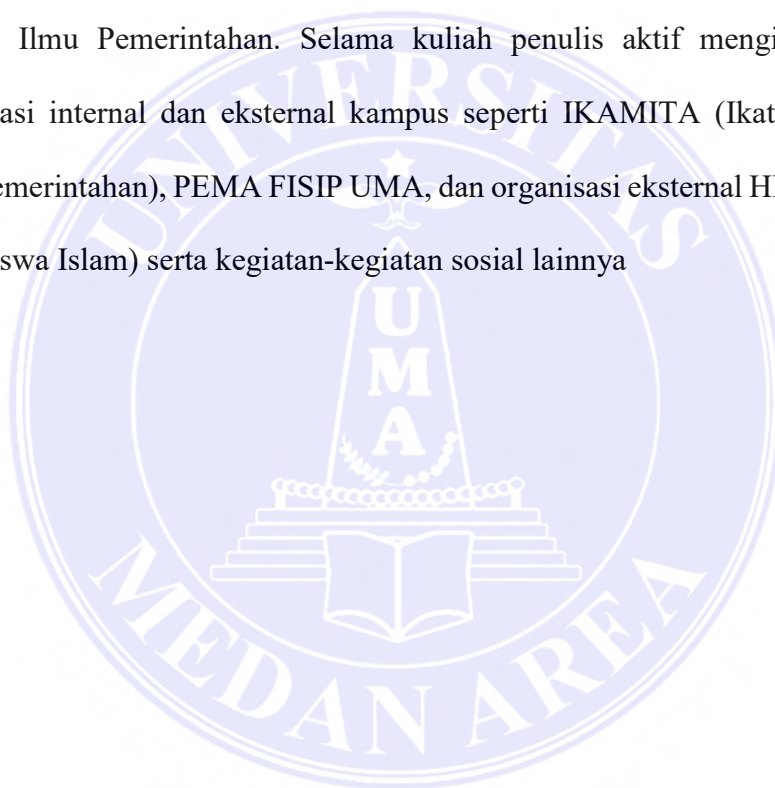
Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 7 Juni 2021
Yang Menyatakan



Dewi Purnamasari

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Panji I, Kec.Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan pada tanggal 01 Maret 1996. Anak keenam dari bapak Suparno dan ibunda Rohani. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah SDN 118390, SMP N 2 Kampung Rakyat, SMA N 2 Kampung Rakyat. Pada tahun 2016 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Selama kuliah penulis aktif mengikuti beberapa organisasi internal dan eksternal kampus seperti IKAMITA (Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan), PEMA FISIP UMA, dan organisasi eksternal HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya



ABSTRAC

Women's participation in politics will predictable very poor performance, but Over time women began to realize how important women's participation in politics. women in general books in the world of politics show that there is a stretched of women's political participatin.

This study aims to determine the things that cause women's political participation perwiran Nurul Huda in the 2019 legislative elections Kab.Labuhanbatu Selatan. The method used in this research is qualitative descriptive, In this study using interview techniques, observation and documentation. this research also consists of key informants and supporting informant. The purpose of this study is to analyze women's political participation perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kec.Kampung Rakyat Kab.Labuhanbatu Selatan in the 2019 legislative elections.

The results obtained from this study are 1) women participate and make their political choices based on the information received. Each woman's political participation is different, there are women who exercise their voting rights based on information and knowledge obtained about party profiles, candidate figures, and vision and mission but there are also women who exercise their voting rights even with minimal knowledge of parties, candidates and vision. mission in another sense there are certain factors that influence. 2) There are also women voters who have knowledge and information about the legislative election process, but from various information received by women voters do not use their voting rights because of the assumption that the political process is unable to convince them that there will be changes for the better. 3) Political participation of women officer Nurul Huda was formed through encouragement and influencing factors. Influencing factors play an important role in shaping the cognitive building of female voters and in turn, will encourage them to affirm their political choices.

Keywords: Women's Political Participation, Research Methods

ABSTRAK

Perempuan keikutsertaannya dalam dunia politik diprediksi akan sangat buruk prestasinya, namun seiring berjalannya waktu bebrbagai pihak termasuk perempuan itu sendiri mulai menyadari betapa pentingnya keikutsertaan perempuan dalam dunia politik. Tampilnya perempuan dimuka umum, dalam dunia politik, menunjukkan adanya geliat partisipasi politik perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan partisipasi politik perempuan perwiran Nurul Huda dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Penelitian ini juga terdiri dari informan utama dan juga informan pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi politik perempuan perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kec.Kampung Rakyat Kab.Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) perempuan berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang diterima. Partisipasi politik setiap perempuan berbeda-beda, terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figure caleg, serta visi misinya akan tetapi juga terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya meski dengan pengetahuan minim tentang partai, caleg dan juga visi misi dalam artian lain ada faktor tertentu yang mempengaruhi. 2) Terdapat pula pemilih perempuan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang proses pemilu legislatif, tetapi dari berbagai informasi yang diterima pemilih perempuan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya hal ini karena adanya anggapan bahwa proses politik yang tidak mampu meyakinkannya bahwa akan ada perubahan yang lebih baik. 3) Partisipasi politik perempuan perwiran Nurul Huda terbentuk melalui dorongan serta faktor mempengaruhi. Faktor mempengaruhi sangat mengambil peran penting sehingga membentuk bangunan kognitif pemilih perempuan dan nantinya akan mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perempuan, Metode Penelitian

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (YME), sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang begitu berat. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suparno dan Ibunda Rohani yang telah banyak berjuang dan memberikan do'a serta dukungan penuh kepada penulis.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto. MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu Beby Mashito Batubara, S.sos, MAP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Armansyah Matondang S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Khairunnisa Lubis, S.sos, M.Ipol selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman stambuk 2016 prodi Ilmu Pemerintahan. Santi Marselida, Rani Novita, Siti Aminah, Fobaso Cordias, Bang Andreas, Disa, Rika, Dachi, Armada, Kristina, Restu, kak Bella, Citra Sihombing, Syafriansya, Cika Silalahi, Rani Reka, Ika Suhaila yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari pada Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
9. Seluruh adinda stambuk 2017 Prodi Ilmu Pemerintahan, Maya, Ajijah, Atin, Bery, Dewi, Ulfa, Dian, Isra, Fitri, Bunge, Umi, Rizky, Bowo, Ariel, Dosma, Isak, Umi dan banyak lagi yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Seluruh adinda stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu penulis Dilla, Dinda, Ihda, Imel, Ripa, Maya, Siska, Dodi

Kurniawan, Dodi Wahyudi, Rusdi, Rizky, Elisabet, Novita, Januarni, Riandi, dicky, Cindi, Mulia Lanteng, Rida, Beby, dan masih banyak lagi yang saat ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

11. Kepada adinda stambuk 2019 prodi Ilmu Pemerintahan Nadia, Intan, Bayu, Bella, Vina, Anwar, Faisal, Jestu, Adi, Yosi, Sinta, Rizky, Dira, Rianda, Ningsi Warungu, Selvin Halawa, Marwa, Sri, Agustina, Feni, Jeni, Kristin, Netrin, Tiara, Selli, Ratu, Elak, Hot Ber, Aldo, Beni, Gusti, Happy, Mustopo, Alvin, Kurniawan, Wiman, Rusli, dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
12. Kepada kawan-kawan kepengurusan IKAMITA periode 2018-2019 yang sama-sama berjuang dengan penulis baik senang maupun susah.
13. Seluruh teman sejawat yang berhimpun dalam organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis agar dapat menyelesaikan tulisan ini.
14. Kepada senior atau alumni yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi serta banyak juga berbagi ilmu atau bertukar pikiran dengan penulis
15. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
16. Rekan-rekan se-almamater
17. Kepada Saudara/i yang di Kampung yang banyak memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, Agustus 2020

Hormat Penulis



Dewi Purnamasari

16.851.0021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Partisipasi Politik.....	9
2.1.1 Pengertian Partisipasi	9
2.1.2 Partisipasi Politik	11
2.2 Jenis-Jenis Pemilih.....	13
2.3 Partisipasi Politik Perempuan	14
2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	20
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Sifat Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Waktu Penelitian	31
3.5 Informan Penelitian.....	31

3.6 Sumber Data.....	33
3.7 Definisi Operasional.....	34
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.9 Teknik Analisis Data.....	37
3.10 Keabsahan Data.....	40
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Gambaran Umum Perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I.....	55
4.3 Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kab. Labusel.....	57
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

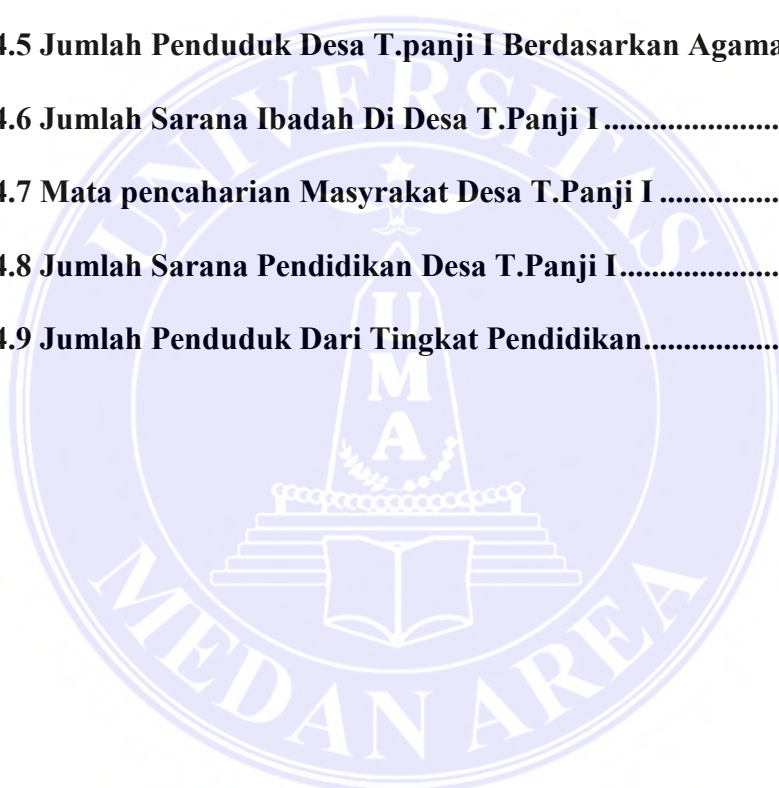
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik.....	13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian	28
Gambar 3.14 Teknik Analisa Isi (<i>Content Analysis</i>)	39
Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa Teluk Panji I	54



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1 Luas Lahan Menurut Peruntukan Di Desa teluk Panji I	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Teluk Panji I.....	47
Tabel 4.3 Penduduk Desa Teluk Panji I	48
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Desa T.panji I Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa T.panji I Berdasarkan Agama.....	49
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Ibadah Di Desa T.Panji I.....	50
Tabel 4.7 Mata pencaharian Masyarakat Desa T.Panji I	51
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pendidikan Desa T.Panji I.....	51
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Dari Tingkat Pendidikan.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi dalam perwujudannya memiliki syarat mutlak yang harus dipenuhi yakni yang disebut dengan istilah partisipasi. Partisipasi warga negara Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan demokrasi yang dianut oleh Indonesia sendiri. Terutama dialami oleh kaum perempuan, yaitu warga negara yang masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Demokrasi akan semakin bermakna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yaitu perempuan. Jadi, jika proses politik tidak melibatkan perempuan, itu pasti bukan demokrasi sejati (Isnaini, 2013: 1).

Rendahnya partisipasi perempuan di politik formal disebabkan karena pengaruh budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat, yaitu dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan yang didukung oleh ideologi gender yaitu pola relasi laki-laki dan perempuan sebagai proses hasil budaya yang kemudian dibekukan. Kultur patriarki yang terdapat didalam masyarakat telah memberikan legitimasi kepada laki-laki untuk menguasai perempuan disegala aspek kehidupan yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua atau *the second class*.

Sedangkan dalam bahasa politik yang menunjukkan ketidakberpihakan kepada perempuan adalah “perempuan tidak perlu berpolitik”. Jargon ini seolah menggambarkan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki yang tidak bisa dimasuki oleh perempuan. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut tidak cocok dengan ranah politik yang penuh intrik dan kotor (Manurung, 2009: 54). Lebih kompleksnya kendala yang dikaitkan dengan

perempuan ada dua, yaitu kendala structural, yang seringkali berkaitan dengan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Sedangkan kendala kultural yakni terkait dengan faktor budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sekedar di rumah.

Pelaksanaan perhelatan pesta demokrasi, baik perhelatan demokrasi secara nasional seperti pemilihan presiden, legislatif dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan gubernur, pemilihan bupati serta pemilihan kepala desa (Pilkades) dari sudut pandang peneliti Desa Teluk Panji I memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang peneliti maksudkan adalah pada setiap perhelatan demokrasi ditingkat nasional dan lokal peneliti melihat secara garis besar ada dua hal menarik dari sudut pandang peneliti.. *Pertama*, persoalan partisipasi yang dalam pandangan dan pengamatan (*observasi*) yang peneliti lakukan, diduga terdapat kekhawatiran tentang kuantitas partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Desa Teluk Panji I secara khususnya. Peneliti dapat mengungkapkan hal tersebut dengan melihat bagaimana kondisi psikologis penyelenggara tingkat desa, yaitu Panitia Pemungutan Suara (KPPS), mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kedua, hal menarik berikutnya yang muncul dari sudut pandang peneliti adalah aktivitas perempuan di Desa Teluk Panji I dalam merespon peristiwa demokrasi termasuk pemilihan legislatif (Pileg).

Salah satu kegiatan perempuan yang dimaksud adalah perwira Nurul Huda yang didekati calon legislatif untuk mendapatkan simpati dan terpilih menjadi anggota legislatif. Selain itu, penyelenggara pemungutan suara (KKPS) juga melakukan mobilisasi agar perempuan menggunakan hak pilihnya. Dari fenomena yang ada, sekali lagi dapat dikatakan bahwa pernyataan dalam hal ini perwira

perempuan merupakan salah satu pintu masuk strategis untuk mendorong tanda-tanda partisipasi perempuan dalam politik.

Tingkat partisipasi politik selalu menjadi sorotan pada kuantitas baik yang menurun maupun yang meningkat yang dapat dijadikan tolak ukur sistem demokrasi. Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, berdasarkan keputusan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2019 ada 35 orang terpilih menjadi anggota DPRD Labusel periode 2019-2024. Perebutan kursi DPRD Labusel tertinggi dari Partai Amanat Nasional 7 kursi, PDIP 6 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, Partai Golkar 4 kursi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 4 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 3 kursi, 2- Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi, dan Partai Perindo 1 kursi. Sedangkan suara sah tertinggi untuk anggota DPRD Labusel berasal dari Partai Amanat Nasional yaitu Ediy dengan total 5.675 suara. (<https://podiumindonesia/hasilpenetapan KPU>, diakses pada 05 Oktober 2020).

Dalam pasal 77 UU No.8 Tahun 2012 disebutkan bahwasanya kampanye politik merupakan bagian dari bentuk pendidikan kepada masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Dapat dimaknai bertanggungjawab dalam kampanye yang dilaksanakan merujuk pada peraturan UU atau ketentuan yang berlaku maka bisa bermakna juga bahwa setiap janji baik berupa tawaran program atau bentuk lainnya dalam kampanye yang disampaikan para kandidat dalam

kompetisi pemilu benar-benar harus dapat dipertanggung jawabkan nantinya setelah memenangkan kompetisi dan memperoleh jabatan atau kekuasaan.

Pemilu Legislatif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2019, dalam pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai bentuk kampanye dari calon mulai dari strategi umum seperti memasang baliho, mendekati masyarakat, hingga mengandalkan tim sukses yang ada di setiap daerah. sampai ke tingkat desa. Berdasarkan pengamatan penulis, fenomena yang ada di Desa Teluk Panji I, khususnya pada musim pemilihan, juga menjadi incaran para caleg untuk mendapatkan suara. Masyarakat yang ada terutama perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu seperti perwiran menjadi kelompok utama yang dituju untuk dipengaruhi hak pilihnya.

Perwiran perempuan di Desa Teluk Panji I menjadi sasaran caleg dikarenakan secara pemikiran bahwasanya untuk menentukan hak pilihnya jarang sekali didasari secara rasional dengan mempertimbangkan program dan visi misi yang diajukan caleg tertentu. Hal ini bukan tanpa alasan, caleg yang menang dalam kompetisi ketika telah memiliki jabatan maka akan lupa dengan apa yang dijanjikan diawal, sehingga anggapan ini terus tumbuh dimasyarakat terutama kaum perempuan yang berpikir secara realistis apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dan lebih mempertimbangkan keuntungan yang didapat, erat kaitannya dengan *money politik*.

Situasi seperti ini yang dicoba oleh kaum caleg, perempuan yang sering dijadikan objek penawaran politik uang, perempuan yang lebih rentan mobilisasi tanpa mempertimbangkan rasionalitas pilihannya, selain posisinya yang dapat memperoleh suara dari pasangan calon, juga akan diam tentang pemberontakan

yang terjadi. Politik uang didefinisikan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga materi lainnya berupa hadiah, kebutuhan pokok atau cinderamata untuk materi kampanye lainnya. Hal ini biasanya membuat efektifitas mempengaruhi calon pemilih menjadi tidak efektif karena pemilih perempuan terkadang tidak mengakui bahwa ini adalah money politic sehingga apapun yang diberikan kepada mereka akan diterima.

Daftar pemilih tetap yang tercatat dalam data KPU Kabupaten / Kota Labuhanbatu Selatan sebanyak 89.642 pemilih laki-laki, 87.945 pemilih perempuan dengan total 177.587 pemilih. Data yang tertera menunjukkan bahwa penyajian daftar pemilih perempuan dan daftar pemilih tetap laki-laki berbeda, yang berarti antusiasme dan kesadaran masyarakat, termasuk perempuan, cukup tinggi dalam menggunakan hak pilihnya di balik kesibukannya sebagai orang yang dikategorikan dalam kelas dua untuk rumah tangga. Namun demikian, masih diperlukan analisis yang mendalam tentang distribusi hak pilih yang digunakan perempuan, karena pada fenomena yang terjadi perempuan lebih mudah, dan dimobilisasi oleh caleg pada masa kampanye dalam bentuk berbagai iming-iming, termasuk dalam praktiknya. politik uang yang lazim dan lumrah.

Perwiran perempuan di Desa Teluk Panji I adalah bentuk sarana bagi masyarakat untuk mempererat dan memupuk rasa persaudaraan dari masyarakat sebagai ciri dari masyarakat pedesaan. Dari adanya rasa persaudaraan yang cukup tinggi dengan aktivitas perkumpulan yang dilaksanakan meningkatkan kekompakan dari perempuan-perempuan, sehingga ada potensi dalam konteks mengambil keputusan hasilnya bisa sama, dengan dalil mengikuti satu sama lain.

Perwiritan Nurul Huda di Desa Teluk Panji I, merupakan salah satu kelompok perwiritan yang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dibanding perwiritan lainnya. Dalam masa kampanye perwiritan ini menjadi sasaran tim sukses dari calon legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019 dikarenakan jumlah keanggotaan yang cukup banyak secara kuantitas, serta pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas kehidupan masyarakat karena dalam perwiritan ini terdapat aktor-aktor yang berpengaruh salah satunya sebagai contoh yaitu istri dari kepala desa Teluk Panji I sebagai ketua dari perwiritan Nurul Huda. Sehingga dari situasi ini, partisipasi politik perempuan di perwiritan Nurul Huda dimobilisasi untuk mempengaruhi masyarakat lainnya terutama perempuan dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar memiliki peranannya yang sangat penting dan harus meningkatkan kesadaran pemilih perempuan berdasarkan rasionalitas sehingga terwujud hal yang baik yakni demokrasi yang sehat. Jargon “*The Power of emak-emak*” yang muncul dan sangat populer dalam masa kampanye pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, menjadi bukti bahwasanya kaum perempuan serta kelompok-kelompok perempuan memiliki pengaruh besar khususnya dalam pengaruh hasil akhir dari kompetisi politik. Berdasarkan uraian-uraian diatas, serta fenomena mengenai hak suara kelompok perempuan yang menjadi ajang rebutan calon-calon dewan perwakilan menjadi alasan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul: **“Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Perwiritan Nurul Huda Desa**

**Teluk Panji I, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan)”.
Selatan)”).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. BagaimanaPartisipasi Politik Perempuan Pada Perwiran Nurul HudaDesa Teluk Panji I Kec. Kampung Rakyat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kab. Labuhanbatu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Pada Perwiran Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kec. Kampung RakyatDalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kab. Labuhanbatu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat khususnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pemilihan legislatif, tertuju khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan umumnya para pembaca penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis, diharapkan menjadi referensi tambahan baik dalam memberikan data maupun informasi yang berguna terkait partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan dewan perwakilan rakyat. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus sekiranya dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan kajian terkait penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Partisipasi Politik

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan komponen utama dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik di negaranya. Demokrasi tidak akan tercipta tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk menentukan setiap kebijakan yang diambil oleh negara.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, diakses pada 02 Maret 2020). Dikaitkan dengan demokrasi maka partisipasi merupakan suatu gejala dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Pengertian lain tentang partisipasi merujuk dari KBBI, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta observasi kegiatan dalam riset, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati (<https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses 05 Maret 2020). Partisipasi masyarakat menurut Firmansyah (2009), adalah keikutsertaan

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan yang mengutamakan upaya-upaya secara terbuka yang melibatkan beberapa pihak untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan bersama, yang mana upaya-upaya tersebut harus tetap diiringi dengan bentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurut Sugiarti (2003), partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau kekerasan. Dengan begitu unsur penting dalam konsep partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

Dalam hal ini dapat dikatakan mengapa partisipasi masyarakat sifatnya sangat penting, alasan-alasan tersebut yaitu; pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapannya karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong

adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* yang dikemukakan Miriam (1981:118) yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

2.1.2 Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992:180) partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Maksud disini adalah setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut mempengaruhi isi kebijakan umum, dan juga ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik. Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

Miriam (2008), menjelaskan juga kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Dapat dipahami bahwasanya rutinitas sebagai warga negara dengan menggunakan haknya untuk kepentingan yang berkaitan dengan kenegaraan.

Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam politik menandakan bahwa pendidikan

politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Partisipasi politik seseorang dalam bentuknya akan terlihat dalam aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007: 148), bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) baik dalam pemilihan wakil rakyat ataupun dalam pemilihan kepala negara. Michael Rush dan Philip Althoff (2011:148) mengidentifikasi tahap-tahap partisipasi politik melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan
3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan
5. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Selain itu, bentuk partisipasi politik yang disampaikan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson (2008:373) melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori mengenai bentuk partisipasi politiknya yang dituangkan dalam bentuk piramida berikut:



Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik

2.2 Jenis – Jenis Pemilih

Untuk menganalisis rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya, menurut Firmanzah (2009:99-109), terdapat empat jenis pemilih antara lain yaitu:

1. Pemilih rasional

Pemilih jenis ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya. Program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai poliitik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

2. Pemilih Kritis

Proses menjadi jenis pemilih kritis bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis pemilih kritis menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak

dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, juga dapat terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai yang melatarbelakangi pembuatan suatu kebijakan.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya.

4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini lebih memiliki anggapan bahwasanya siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat mengubah kondisi kehidupannya.

2.3 Partisipasi Politik Perempuan

Partini (2014: 29) menjelaskan partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan sebagai warga negara yang baik mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbaikan dalam bidang politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminasi. Hak yang melekat pada kewarganegaraan perempuan, diharapkan bisa menjadi pelaku, pemeran, pembuat dan pembentuk kebijakan dan bukan hanya sebagai pemilih dan pendongkrak suara parpol,

sehingga partisipasi bersifat dinamis dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pendukung kepentingan orang lain.

Kesadaran politik perempuan sangat dibutuhkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih untuk memilih caleg yang mampu mewakili kepentingan setiap masyarakat. Jika partisipasi politik pemilihan perempuan tinggi, maka tingkat kesadaran akan politik masyarakat khususnya perempuan juga dapat diasumsikan tinggi. Hal ini dapat berdampak pada keterpilihan atau keterwakilan perempuan yang tentunya juga cenderung terpenuhi.

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang acap kali didengar dan selalu menarik untuk diperdebatkan. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestic ke ranah publik atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender (Huntington, 1994:110).

Penjelasan tentang hak serta kebebasan perempuan juga ditekankan dalam UUD 1945 yang mana tidak membedakan laki-laki dan perempuan serta menjamin bagi warga negaranya dalam persamaan hak dan kewajiban di bidang politik dan lainnya. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam GBHN. Dalam segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi

dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi hukum.

Partisipasi politik perempuan tentunya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam perwujudan partisipasi politiknya. Untuk terlibat baik secara mental maupun emosi dalam segala aktivitas politik tidaklah mudah karena dipengaruhi banyak faktor. Kendala pokok yang seringkali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu: hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal, *pertama*; kurangnya kesadaran sebagian besar perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal ini dapat terjadi dikarenakan sosio-kultur mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan, dan menyampaikan keinginan-keinginan di bidang politik. *Kedua*; aktivitas politik dianggap tidak layak untuk perempuan karena dianggap dunia yang keras dan kotor serta tidak sesuai dengan citra perempuan. *Ketiga*; lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain karena wawasan orang tua, adat, sistem pendidikan yang dominan mendiskriminasi, lekatnya budaya tradisional dan kecilnya akses perempuan pada penguasaan faktor sosial ekonomi, menyebabkan terbentuknya perspektif dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang laki-laki (Miriam, 1981:86).

Dominasi budaya patriarki memberi garis tegas antara perempuan dan politik, perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh maneuver serta identik dengan uang dan kekuasaan (Muhadjir, 2005:112). Hambatan eksternal yang

terjadi antara lain dari birokrasi yang paternalistic, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik.

Beberapa pertimbangan atau alasan mengapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik, dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dan jabatan politik, adalah:

- a. Perempuan adalah warga negara yang jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki (UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Perempuan)
- b. Sedikitnya perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dapat dianggap merupakan ancaman bagi keabsahan (legitimasi) sistem penyelenggaraan demokrasi, karena setiap saat para pemilih pendukung (konstituen) yang sebagian besar adalah perempuan dapat menarik kembali kepercayaannya atau mencabut mandatnya, apabila para wakil rakyat terpilih tidak memenuhi janji untuk membela dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan.
- c. Partisipasi politik berkaitan dengan memperjuangkan dan menegakkan hak dan kepentingan seluruh rakyat secara merata dan adil termasuk kelompok perempuan
- d. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di politik (partai politik, lembaga legislatif, serta dalam urusan pemilih perempuan).

Muhadjir (2005:85), mengemukakan beberapa peluang bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas perannya di bidang politik antara lain:

1. Pasal 17 dan 21 UUD 1945
2. GBHN yang sejak tahun 1978
3. Konferensi-konferensi wanita sedunia

Begitu terbuka lebar segala kesempatan yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk terpenuhi dan untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu upaya-upaya untuk menunjang pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijaksanaan yang tepat.

Pertama, keluarga memiliki peran yang penting dimulai dari pendidikan keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, anak perempuan yang menjalani pendidikan sejak sekolah sampai ke perguruan tinggi, sebaiknya didorong untuk aktif mengikuti organisasi dan kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menjadi penting dikarenakan berarti secara sadar kaum perempuan telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin.

Ketiga, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik,

Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik, dengan motivasi ini maka dimasa depan akan semakin banyak perempuan yang berkiprah dan berpartisipasi dalam kancah politik.

Kelima, memberi pencerahan, kesadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, memilih, menjadi calon legislatif, calon gubernur/wakil

gubernur, Walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati dan lain sebagainya. Upaya tersebut memerlukan keterlibatan semua pihak yakni kaum perempuan sendiri, kaum laki-laki dan unsur-unsur kebijakan nasional yang berwawasan gender.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan turut mempengaruhi cara berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini karena dalam masyarakat berbagai akumulasi peran individu bertemu. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Puspitawati, 2012:1).

Sedangkan menurut Elly M. Setiadi dan Usman (2015:874), gender merupakan pembagian status dan peran yang secara kultural tidak adil dimana status dan peran laki-laki dianggap superior sedangkan perempuan di posisi inferior akan memunculkan gejala diskriminasi gender.

Dengan demikian, gender merupakan semua atribut sosial mengenai deskripsi laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah, dan pekar. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminime seperti halus, lemah, perasa, sopan, dan penakut. Gender telah memposisikan perempuan secara nyata menjadi tidak setara dengan pihak laki-laki, permasalahan gender dilatarbelakangi oleh situasi kultural dimana fungsi dan peran perempuan yang dibatasi oleh sistem nilai-nilai dan norma tertentu sehingga pembatasan ini dianggap sebagai bentuk pemasangan atas hak kaum perempuan.

Teori Feminis, teori ini menyebutkan kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi kodrat karena pengaruh faktor budaya masyarakat. Sistem patriarki perlu ditinjau kembali, yang dipentingkan menurut teori ini adalah kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan (Umar dalam Remiswal, 2013:13).

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil presiden, Kepala Daerah/wakil Kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikot.

2.5 Penelitian Terdahulu

Wahyudi (2018), dengan penelitian yang berjudul “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”. Hasil penelitian menunjukkan adanya penjelasan bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini. Partisipasi perempuan yang rendah pada lembaga-lembaga politik berakibat tidak terpenuhiseutuhnyakepentingan perempuan dalam sejumlah keputusan politik yang kurang berspektif gender. Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif meskipun telah diatur, namun jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih.

Berbagai usaha dengan bentuk macam gerakan untuk memperjuangkan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Tetapi perempuan yang sudah lama terpasung dan dijebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif berdampak pada apatisisme dan ketidakberdayaan perempuan. Jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari laki-laki, demikian pula jumlah pemilih perempuan. Namun, dalam proses politik jumlah itu bukanlah jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan.

Dalam konteks politik, peran dan posisi perempuan cukup mengalami diskriminasi, di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim dan menempatkan perempuan pada posisi yang disepelekan. Masalah peran dan posisi

kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup memprihatinkan perempuan sendiri belum paham dan menyadari tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender, harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia yang termasuk mayoritas masih buta terhadap wacana politik.

Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perempuan dalam dominasi budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat, memberi garis tegas bahwa perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dengan kondisi seperti ini jelas tidak ada pilihan bagi kaum perempuan. Terlibat ke dunia politik bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif dalam ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensi sekaligus aktualisasi diri bagi kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan

kebijakan publik. Mengapa perempuan harus terlibat, sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan.
2. Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action*. Artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktifitas politik. Dibeberapa negara dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan.

Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarki yang jumlahnya sangat sedikit. Secara global, perempuan masih dikesampingkan dari struktur kepengurusan yang menentukan prioritas politik dan legislatif. Selama ini perempuan benar-benar ditinggalkan dalam proses pembangunan yang berfokus utama pada manusia, perempuan lebih banyak menjadi objek pembangunan dari pada subjek

pembangunan, bahkan peran serta keterlibatan perempuan hanya pada tatanan konsep, perempuan tidak diberikan ruang untuk menentukan kebijakan bahkan yang menyangkut dengan kepentingannya.

Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan telah terbentuknya manusia oleh budaya yang menjadikan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga. Sedangkan politik yang dikaitkan dengan kekuasaan selalu dilihat hanya pantas digeluti oleh kaum laki-laki karena anggapan bahwa perempuan masih dianggap tabu dan kontroversial terhadap kepemimpinan.

Untuk itu sosialisasi tentang konsep memberdayakan perempuan menjadi sangat dibutuhkan, terlebih utama pada sektor mengenai hak-hak politik sebagai penguatan diranah publik harus terus diupayakan secara lebih serius lagi supaya lebih terjamin efektifitasnya dan menciptakan demokrasi yang sehat.

Adapun Penelitian terdahulu lain yang sejenis pernah dilakukan oleh Agus Aftah (2017), tentang partisipasi politik perempuan pada pemilu pada tahun 2015 dengan studi kasus ibu-ibu rumah tangga di keluarahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik perempuan, faktor pendukung dan penghambat tingkat partisipasinya, serta upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Aftah yaitu meski tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilu tergolong cukup tinggi, namun tetap ditemukan data dari informan melalui proses penelitian yakni masih adanya batasan bagi diri perempuan yang hanya menjadi kaum kelas dua, diperbolehkan

hanya bergelut di sektor rumah tangga saja. Angka partisipasi politik perempuan yang cukup tinggi menandakan adanya kesadaran pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan penelitian ini dikemukakan bahwasanya kesadaran ini terbentuk melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan sosial perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Analisa penulis dari dua penelitian terdahulu yang terkait, bahwa banyak penelitian dalam bentuk karya tulis yang dilakukan untuk melihat perkembangan perempuan diarah politik. Tidak luput untuk disoroti mengenai partisipasi politik perempuan tentang pemenuhan kuota yang tersedia sebanyak 30% sebagai jalan untuk terjun langsung perihal pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Wahyudi (2018), dengan penelitian yang berjudul “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”. Penelitian yang dilakukan oleh penulis perbedaannya terdapat pada titik fokus masalah yang diteliti, yang mana hal yang dikaji seputar partisipasi perempuan yang tergabung pada suatu kelompok perwiran dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan legislatif. Partisipasi yang dimaksud ingin menggali lebih dalam, apa motivasi, latar belakang atau hal yang mempengaruhi sehingga pada pemilihan legislatif mereka sampai pada titik berangkat ke TPS menggunakan hak suaranya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agus Aftah (2017), dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2015 Dengan Studi Kasus

Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”. Pada penelitian ini ditemukan hal-hal mengenai partisipasi politik perempuan baik itu faktor pendukung dan penghambat, serta upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Mengenai masalah yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berupaya menggalih lebih dalam mengenai partisipasi politik perempuan sehingga ditemukan jawaban dari pengamatan penulis.

Dari kedua penelitian terdahulu dapat dilihat bahwasanya masih terdapat kendala-kendala yang menjadikan partisipasi politik perempuan belum maksimal meski tetap ada perkembangan terkait peran serta partisipasi politik perempuan di ranah politik baik itu yang tergabung dalam pemerintahan dan pembuat kebijakan maupun yang memberi dukungan. Kendala-kendala yang ditemukan dari penelitian satu kepenelitian lainnya dapat dijadikan dasar untuk terus melakukan dan mengembangkan penelitian yang terkait sehingga dapat menjawab masalah seputar partisipasi politik perempuan di ranah politik.

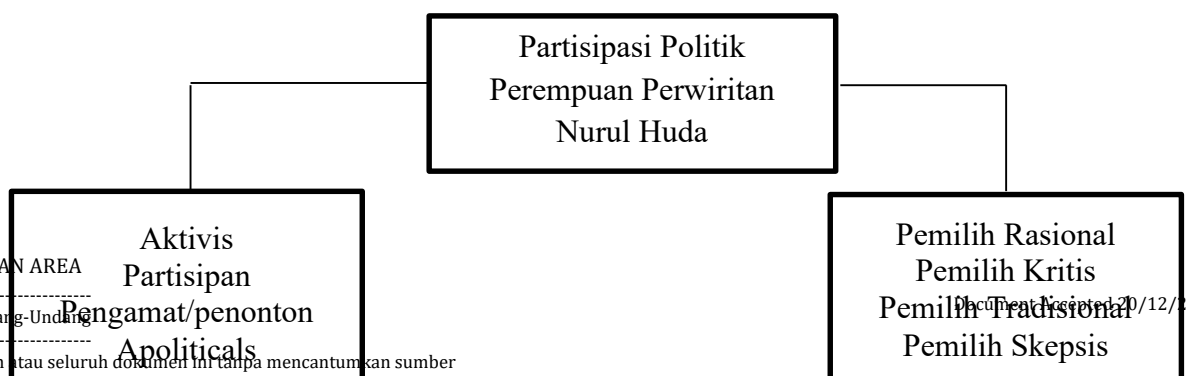
2.6 Kerangka Berpikir

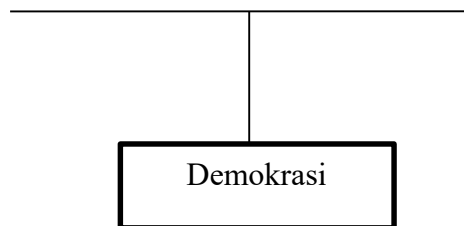
Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yang mana teori-teori ini akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai partisipasi politik pemilih perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 yang tergabung pada perwiran Nurul Huda di Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Alasan mendasar untuk mengamati partisipasi politik perempuan dalam perwiran ini untuk mengetahui dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan legislatif didasari atas motivasi apa. Apakah karena hal yang menguntungkan, karena faktor kedekatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Dari penelitian ini akan ditemukan jawaban yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dan upaya solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Karenadengan partisipasi politik perempuan yang aktif dan sifat pemilih yang rasional maka dapatterwujud pula demokrasi yang subtansial.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan teori tentang bentuk partisipasi yang disampaikan oleh David F Roth dan Frank L.Wilson. Pada teorinya disampaikan, masyarakat itu bentuk partisipasinya terbagi dalam empat kategori yaitu Aktivis, partisipan, penonton dan apolitis. Teori lain yang penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang disampaikan oleh Firmanzah terkait jenis-jenis pemilih yang terbagi menjadi pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dikembangkan penulis.





Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Meleong (2011:5), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang disebut juga sebagai penelitian *naturalistic* (alamiah) karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga metode *ethnography* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan pada bidang antropologi budaya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interaktif dengan sumber data yang valid agar data yang dianalisis memperoleh makna.

Pada penelitian ini, peneliti akan terjun langsung untuk mengamati keadaan yang terjadi dan melakukan pengamatan dengan cara wawancara kepada

narasumber berkaitan dengan fenomena yang terjadi dimasa kampanye pada kontestasi politik untuk melihat partisipasi politik pemilih perempuan.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Achmadi dan Narkubo (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga mendapatkan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2014: 13) menyatakan bahwa metode-metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan secara mendalam kepada para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Dimana peneliti akan terjun langsung ke lingkungan tempat dimana informan berada sehingga peneliti benar-benar mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena data yang diperoleh diharapkan akan sangat alami dan tidak berbeda dari kondisi lapangan. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.4 Waktu Penelitian

Dalam Skripsi ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut.

No	Uraian	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desembe				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	█	█	█	█	█	█																						
2	Seminar Proposal							█	█																				
3	Perbaikan Proposal									█	█	█	█	█	█	█	█												
4	Penelitian																	█	█	█	█								
5	Penyusunan Skripsi																					█	█	█	█	█	█	█	█
6	Seminar Hasil																										█	█	
7	Perbaikan Skripsi																											█	█

Tabel 3.1 Waktu Penelitian Sumber: dikelola oleh penulis

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Informan menurut Arikunto (2006: 130) adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif.

Informan penelitian merupakan sumber informasi yang memuat data yang diperlukan dalam menguraikan dan menafsir fenomena-fenomena objek yang diteliti. Menurut Bungin (2011), mengemukakan bahwa, Informan penelitian diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel, sampling yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Artinya, subjek penelitian relatif sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian namun subjek penelitian dapat terus bertambah sesuai keperluannya. *Snowball sampling* dilakukan karena informasi tidak cukup dari satu sumber saja, nantinya informan akan menunjuk sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi begitu pun seterusnya hingga informasi berada pada titik jenuh.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposif. Bungin (2011) mengemukakan bahwa prosedur purposif adalah salah satu strategi yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua perwiran Nurul Huda
2. Informan utama dalam penelitian ini adalah anggota dari perwiran Nurul Huda

3. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu salah satu Calon Legislatif dalam kontestasi pemilihan legislatif tahun 2019 di Kab. Labusel guna memperoleh informasi serta data yang lebih akurat.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Suharsimi Arikonto, 2010). Sumber data yang utama dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literature lain-lain (Lexy Moleong, 2005). Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, dan hasil data yang akan diolah yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama (Lexy Moleong, 2005). Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini selain berupa kata-kata, bahasa dan

tindakan dari informan juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan media buku dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah definisi yang berdasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti serta tidak membingungkan. Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel maka seorang peneliti membuat dan menyusun alat ukur data yang tepat dan akurat. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik perempuan adalah perempuan yang ikut serta secara langsung dalam aktivitas politik di Desa Teluk Panji I.
2. Perempuan adalah warga Desa Teluk Panji I, Kecamatan Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan yang tergabung dalam perwiran Nurul Huda.
3. Pemilihan Legislatif menurut peraturan pemerintah No.7 tahun 2017 adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Pemilih dapat dikategorikan menjadi pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan..

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Juliansyah NOOR (2012: 138) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung

dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

Menurut Sugiyono (2014: 231) wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Menurut Arikunto (2006: 155), wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari respon agar diperoleh informasi yang relevan.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014: 145) mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. sebagai data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian,

cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flashdisk.

3.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Analisis data yang dijelaskan Sugiyono (2014: 244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (2012: 255) meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

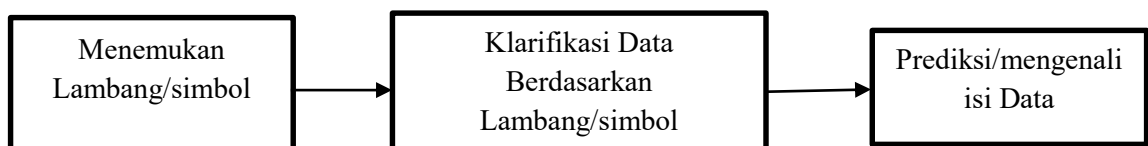
4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Teknik-teknik analisis data pada penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik yang disampaikan oleh Burhan Bungin mengenai penelitian sosial, yaitu

1. Analisis isi (*Content Analysis*)

Pada penelitian kualitatif terutama dalam strategi verifikasi kualitatif teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan. Analisis isi berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan misi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Secara teknik, analisis isi mencakup upaya-upaya, klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klarifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi. Secara jelas alurnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.1 Teknik Analisis isi (*Content Analysis*)

2. Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan tanpa harus diperincikan hanya perlu menganalisis dari domain atau kategori simbolik dari yang diteliti. Teknik ini dikenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi.

3. Analisis Taksonomi

Analisis dengan teknik taksonomi adalah hasil yang terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Ini diperoleh melalui observasi dalam wawancara serta dokumentasi yang terfokus.

4. Analisis Komposisional

Teknik analisis komposisional adalah teknik analisis yang cukup menarik dan paling mudah dilakukan karena menggunakan “pendekatan kontraks elemen”. Dalam teknik ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontraks satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara terperinci. Unsur-unsur atau elemen-elemen yang kontras akan dipilih oleh peneliti dan selanjutnya akan dicari term-term yang dapat mewadahnya. Analisis komposisional baru layak dilakukan kalau seluruh kegiatan observasi dan wawancara yang berulang-ulang telah memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian. Penelitian analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan berkali-kali, digelarkan dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca. Pada tahap ini tidak perlu pengelompokan pada domain atau sub-domain yang penting hasil observasi dan wawancara dapat dibaca dengan mudah sehingga dapat editing terbatas pada data tersebut.

b. Pemilihan Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil wawancara dipilih menurut domain atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal.

c. Menentukan Elemen-elemen Kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilihan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

3.10 Keabsahan Data

Validasi data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. validitas yang digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Lexy Meleong, 2005). Triangulasi dilakukan karena untuk menguji keabsahan data dan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat statistik dan bertujuan untuk menggabungkan data yang sudah penulis dapatkan melalui wawancara, observasi, studi literatur serta studi dokumentasi sehingga didapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu

mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder* (Burhan Bungin, 2012).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Demokrasi tidak akan tercipta tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk menentukan setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Kunci dari pemikiran ini adalah keterlibatan yang mengutamakan upaya-upaya secara terbuka yang melibatkan beberapa pihak untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan bersama, yang mana upaya-upaya tersebut harus tetap diiringi dengan bentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dari hasil penelitian diatas maka disimpulkan beberapa poin berikut ini:

1. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan, dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, turut serta dalam proses pembangunan.
2. Partisipasi politik perempuan di perwiran Nurul Huda pada pemilihan legislatif tahun 2019 cukup tinggi, namun masih

dipengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan *money politic*. Perempuan menjadi sasaran caleg dengan pemberian berbagai hal seperti bentuk bantuan sembako, souvenir, sampai bentuk amplop yang diberikan oleh tim sukses dari para caleg yang ada.

5.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 khususnya yang dilaksanakan pada Kabupaten

Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang sehat serta memperoleh bentuk partisipasi dengan hasil yang efisien-efektif maka hendaknya selalu melibatkan perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan. Peningkatan akses informasi dan perluasan mengenai proses pemilihan legislatif secara sistematis juga perlu dilakukan di setiap sudut daerah dan dari berbagai kalangan serta lapisan sosial. Baik sosialisasi melalui media cetak, audio, seminarseminar politik serta penyuluhan politik.

2. Perempuan harus berada dalam barisan terdepan yang aktif berpartisipasi dalam politik dan terus meningkatkan partisipasinya untuk tetap mengawal perkembangan politik dan evaluasi dengan mengikuti rapat-rapat perencanaan pembangunan seperti reses anggota dewan. Mengingat pemilih perempuan berasal dari kondisi sosial yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan hal ini sangat berkorelasi terhadap proses politik. Maka pemerintah maupun pihak-pihak seperti LSM dapat memberikan bentuk pendidikan politik yang bersifat menyeluruh dan peerasif sehingga pemilih perempuan dapat mengetahui proses politik dengan lebih jelas.
3. Partisipasi politik perempuan pada tingkat aktivis masih rendah, oleh sebab itu penulis menyarankan kepada seluruh stakeholder seperti partai politik, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi terkait, NGO dan kalangan yang seharusnya menangani persoalan ini untuk memberikan pendidikan politik kepada perempuan di Desa Teluk Panji supaya partisipasi politik mereka terutama ditingkat aktivis meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi dan Narkubo. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi ed.)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama (hal.118)
- Burhan, Bungin. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Prenadamedia.
Jakarta
- Huntington, Samuel P. DANnELSON, Joan. 1994. *IPartisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. (hal.110)

M. Darwin, Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan; reorientasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Wacana. (hal. 112)

Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi

Mahasya Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2012.

Qualitatif Data Analysis (terjemahan). Jakarta. UI-Press.

Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja

Rosdikarya. Bandung

Noor Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian Bandung*. Jakarta.

Prenadamedia

Group

Rush, M Dan Althoff, P. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarti, dkk, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*.(Malang:

UMM Press,

2003)

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D*.

Bandung:

Alfabeta

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2017. *Metodologi*

Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016

Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikot.

Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar (UUD 1945)

Jurnal

Agus Aftah. 2017. Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu pada Tahun 2015

(Studi pada Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton

Bandar Lampung) [Skripsi]. Bandar Lampung; Universitas Islam Negeri Raden

Intang Lampung

Aspinall, E., dan Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Firmansyah, S. (2009). Partisipasi Masyarakat. [Online] tersedia:

<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/> (Diakses 10 Juli 2020).

Ikwan Kurnia. 2020. Partisipasi Pemuda Dalam Pengelolaan Daerah Aaliran

Sungai (DAS) Deli di Kota Medan [Tesis]. Medan, Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara

Isnaini Rodiyah. 2013. Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. JKMP. No 1(1)

Manurung, Rosida Tiurma, 2009, Ketidakberpihakan Jargon Politik Terhadap

Perempuan Di Indonesia, Jurnal Socioteknologi Edisi 16 no 8, April 2009, Bandung: Universitas Kristen Maranatha Press.

Partini, "*partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di*

Indonesia," *Jurnal Perempuan: perempuan Politisi*, Vol 19 no 2 Mei 2014. Hlm 29

Very Wahyudi. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea:

Jurnal Politik Islam Vol. 1 No 1(Jan-Jun) 2018 Hlm 63-68, Mataram: UIN Mataram.

Yanto. 2014. Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif *Incumbet*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meghadapi Pemilu Legislatif 2014

(Studi Kasus Partai Golkar Di Kabupaten Mukomuko) Jurnal Profesional FIS

UNIVED Vol. 1 No.2 Desember 2014 Hlm 61-72, Bengkulu:

UNIVED **Internet** <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>,

Diakses Pada 02 Maret 2020 <https://infopemilu.kpu.go.id>,

Diakses Pada 30 Juli 2020

<https://podiumindonesia/hasilpenetapan KPU>, diakses pada 05

Oktober 2020 <https://www.labuhanbatuselatan.go.id>, diakses

pada 04 Oktober 2020 KBBI. (2020). Definisi Partisipasi.

[Online]. Tersedia : [Http://Kbbi.Web.Id/](http://Kbbi.Web.Id/).

(Diakses 5 Maret 2020)

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian yang berjudul : Analisa Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan

Legislatif (PILEG) Tahun 2019 (Studi Kasus Perwiraan Nurul Huda Desa Teluk Panji I Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan), guna menyelesaikan skripsi pada program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Medan Area, Medan

Pertanyaan Wawancara Untuk Perempuan Perwiraan Nurul Huda

Identitas Informan

Nama

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Instansi :

Jabatan :

1. Bagaimana pandangan anda tentang politik?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan pemilu/pileg sejauh ini yang berjalan di Desa Teluk Panji I?
3. Bagaimana keterlibatan anda dalam politik/partisipasi politik (sekedar ikut memilih, ikut kampanye, mengikuti perkembangannya dll)?
4. Bagaimana keterlibatan anda dalam pileg di tahun 2019?

5. Apa saja aktivitas/kegiatan yang anda lakukan pada musim pemilihan legislatif?
6. Saat kampanye/sosialisasi apa saja yang disampaikan para caleg?
7. Apakah anda ikut serta merealisasikan hak suara dalam pileg 2019?
8. Apa alasan anda untuk menetapkan pilihan terhadap caleg tertentu pada pileg 2019?
9. Pada masa pileg apakah anda menerima pemberian tertentu dari caleg (souvenir, uang bantuan, dll)?
10. Bagaimana menurut anda mengenai *money politic* atau pemberian yang diberikan caleg?
11. Pada saat menentukan pilihan, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan anda (suku, agama, kedekatan, pemberian, visi misi)?
12. Selama perhelatan pileg tahun 2019, apakah anda terlibat menjadi tim sukses atau saksi dari salah satu caleg?
13. Menurut anda sejauh mana perempuan penting untuk ikut serta dalam politik?
14. Menurut anda mengapa kelompok-kelompok perempuan menjadi sasaran kampanye?
15. Sejauh ini apakah dalam memberikan hak suara visi misi dari caleg menjadi pertimbangan anda?
16. Menurut anda, mengapa perempuan tidak tertarik/kurang tertarik pada politik?
17. Apa yang anda harapkan untuk kedepannya demi terwujudnya demokrasi yang sehat terutama mengenai perempuan?

Pertanyaan Wawancara Untuk Anggota legislatif Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Instansi :

Jabatan :

1. Bagaimana pandangan anda melihat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif baik secara aktif maupun pasif?
2. Seberapa penting anda melihat peran perempuan dalam pemilihan legislatif?
3. Seberapa besar target suara dari caleg terhadap kelompok perempuan?
4. Strategi apa yang digunakan untuk mempengaruhi kelompok perempuan?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai kampanye yang berlangsung selama ini apakah sudah memenuhi kategori yang memenuhi pemberian pendidikan politik?

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Ket : Perwiran Nurul Huda



Ket : Perwiran Nurul Huda



Ket : Peneliti bersama Ketua Perwiran Nurul Huda



Ket : Peneliti bersama Anggota Legislatif Kab. Labuhanbatu Selatan